



Volume 16 No. 1 Juli 2025

Page: 24-40

Received: 20-05-2025
Revised Received: 20-05-2025

Accepted: 10-06-2025
Online Available: 17-07-2025

PERAN DAKWAH MODERAT DALAM MENGHADAPI TANTANGAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

THE ROLE OF MODERATE DA'WAH IN FACING THE CHALLENGES OF IDENTITY POLITICS IN INDONESIA

Azzam Nabil Hibrizi^{1,a)}, Ni'mahtun Faridah², Kristalia Sabita Rasadi³,
Ma'shum Sada⁴, dan Qomariyah⁵

^{1,2,3,4}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jl. Pahlawan Km 05, Pekalongan, Indonesia

^{a)}e-mail: azzam.nabil.hibrizi@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, praktik politik identitas yang terjadi di Indonesia menjadi tantangan baru bagi aktivitas dakwah dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan toleransi. Politik identitas yang memanfaatkan perbedaan agama, suku, dan budaya untuk kepentingan politik tertentu kerap kali menimbulkan polarisasi dan konflik sosial hingga berdampak pada aktivitas dakwah itu sendiri. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dakwah Islam moderat dalam merespons tantangan politik identitas di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian studi literatur sebagai sumber data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah moderat yang berlandaskan pada nilai-nilai toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal dapat menjadi solusi dalam menghadapi politik identitas yang merusak harmoni sosial. Di era digital, dakwah moderat juga dapat disebarluaskan melalui media sosial agar lebih menjangkau generasi muda. Dengan begitu, dakwah tidak hanya sebagai sarana penyampaian ajaran Islam, tetapi juga sebagai penggerak terciptanya kohesi sosial yang inklusif. Kontribusi penelitian ini yaitu memperkuat pemahaman tentang dakwah moderat sebagai respon atas politik identitas, serta membuka peluang kajian lanjutan mengenai



efektivitas strategi dakwah moderat dalam konteks digital dan masyarakat multikultural.

Kata kunci: Dakwah Moderat; Politik Identitas; Pluralitas; Moderasi Bergama.

ABSTRACT

Along with the times, the practice of identity politics in Indonesia has become a new challenge for da'wah in maintaining the values of unity and tolerance. Identity politics that utilize religious, ethnic, and cultural differences for political purposes often lead to social polarization and conflict, which has an impact on da'wah itself. This research aims to examine the role of moderate Islamic da'wah in facing the challenges of identity politics in Indonesia. Through a descriptive qualitative approach and literature study, the results show that moderate da'wah that prioritizes tolerance, national commitment, non-violence, and accommodation of local culture can be a solution to maintaining social harmony. In the digital era, moderate da'wah is also effectively disseminated through social media to reach the younger generation, so that da'wah not only conveys Islamic teachings, but also strengthens inclusive social cohesion. This research strengthens the understanding of moderate da'wah as a response to identity politics and opens opportunities for further studies on moderate da'wah strategies in the digital context and multicultural society.

Keywords: Moderate Da'wah; Identity Politics; Plurality; Moderate Religion.

1. Pendahuluan

Dakwah moderat merupakan pendekatan dakwah Islam yang menekankan pada nilai-nilai keseimbangan (tawazun), toleransi (tasamuh), dan keadilan (ta'adul). Pendekatan ini bertujuan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang damai, inklusif, dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, konsep umat wasathan (umat pertengahan) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 menjadi landasan utama dakwah moderat. Umat Islam diharapkan menjadi penengah yang adil dan seimbang dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dakwah moderat menghindari sikap ekstrem, baik yang terlalu keras (ifrāt) maupun yang terlalu

longgar (tafrīt), dan berusaha menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) (Rahmawati, 2021).

Berkaitan dengan hal ini, penyuluh agama memiliki peran strategis dalam memperkuat moderasi beragama melalui dakwah moderat. Mereka berfungsi sebagai agen perubahan yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan pendekatan yang humanis dan dialogis, seperti melalui sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami ajaran Islam yang toleran dan damai.

Peran Da'i tersebut juga relevan dengan kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam etnis, agama, serta budaya yang membentuk sebuah struktur sosial yang kompleks (Nurlaela,

2023). Namun di sisi lain, dalam konteks politik, hubungan antara dakwah dan politik kerap diperdebatkan karena keduanya memiliki orientasi yang berbeda: dakwah berfokus pada penyampaian nilai-nilai ilahiah, sementara politik sering dipersepsikan berorientasi pada kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan bukanlah tujuan dakwah, melainkan media untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang islami. Sehingga dakwah yang hanya terpaku pada media konvensional akan menemui batas efektivitas, sedangkan integrasi strategis dengan kekuasaan, jika dilakukan secara etis dan bertujuan *ilahiah*, justru dapat memperluas jangkauan dakwah (Nirwana, 2016).

Namun demikian, tidak semua bentuk politik selaras dengan prinsip dakwah. Terdapat dua kategori dalam hal ini, yakni *high politics*, yaitu politik berkualitas tinggi yang bercirikan amanah, akuntabilitas, dan persaudaraan; dengan *low politics*, yang sarat dengan intrik, kekerasan, dan manipulasi. Dalam pandangan Islam, hanya politik jenis pertama yang dapat menjadi alat dakwah yang sah. Politik harus tunduk pada etika dakwah: tidak menyesatkan, tidak menjungkirbalikkan kebenaran, serta menjunjung kejujuran dan keadilan. Jika kekuasaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai agama diperalat untuk meraih dukungan, maka dakwah kehilangan ruhnya dan justru menjelma menjadi alat pembenaran politik yang koruptif (Day, 2005).

Dalam praktiknya, kekeliruan mencampuradukkan tujuan dakwah dan politik kerap terjadi ketika da'i atau tokoh agama terjun ke dunia politik praktis tanpa menjaga

integritas dakwahnya. Seorang da'i sejati hanya menargetkan agar kebenaran sampai kepada masyarakat, bukan untuk mengejar kursi kekuasaan. Sementara itu, seorang politikus cenderung mengkalkulasi untung-rugi, bahkan tak segan menjual ayat suci demi elektabilitas. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa ketika kekuasaan menjadi tujuan dakwah, maka ukhuwwah hanya tinggal slogan, dan dakwah kehilangan keindahan serta kekuatannya. Oleh karena itu, integrasi dakwah dan politik hanya akan bermakna jika politik difungsikan sebagai media penyebaran nilai-nilai *ilahiah*, bukan sebagai tujuan akhir (Nirwana, 2016).

Hubungan antara agama dan politik ini sebenarnya menuntut agar seluruh praktik politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang benar. Politik, dalam tujuannya, berusaha menghasilkan kebijakan dan hukum yang menciptakan rasa keadilan di masyarakat, dan agama dapat memberikan arahan dalam mencapai tujuan tersebut (Al-Farisi, 2020).

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, agama memiliki kedudukan yang sangat penting dan sakral. Agama dan kehidupan kenegaraan di Indonesia tidak dapat dipisahkan. Pemisahan antara keduanya mulai muncul seiring dengan berkembangnya pemahaman sekuler dan liberal yang mendukung pemisahan agama dari politik. Pemikiran seperti ini perlahan-lahan menggerus semangat nasionalisme dan kesatuan di tengah masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Hubungan antara identitas agama dan politik ini dapat dibagi menjadi tiga

pandangan utama, yaitu (Rambe & Mayasari, 2022):

- a. Pandangan Integralistik, yang menyatakan bahwa agama bukan hanya sebagai doktrin yang membimbing manusia secara spiritual, tetapi juga dapat membentuk sistem kenegaraan.
- b. Pandangan Sekularistik, yang berpendapat bahwa agama dan negara harus dipisahkan, sehingga nilai-nilai agama tidak lagi memengaruhi urusan kenegaraan.
- c. Pandangan Simbiotik, yang menyatakan bahwa agama dan negara saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain.

Gerakan politik identitas di Indonesia mengalami perkembangan dari masa pra-modern hingga post-modern. Perpecahan yang terjadi akibat politik identitas sering kali disebabkan oleh fanatisme kesukuan, yang kemudian melahirkan gerakan sosial-politik yang berdampak luas pada berbagai elemen masyarakat. Gerakan politik ini, baik yang bersifat politik maupun ideologis, sering kali didorong oleh para tokoh atau elit politik yang tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan atau setidaknya bergabung dengan rezim yang berkuasa. Pada tahap modern, gerakan politik identitas muncul melalui komunikasi dan jejaring politik yang kuat, yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat posisi para pemimpin, agar tidak ada kelompok yang mendominasi dan agar kekuasaan dapat dibagi secara adil (Rambe & Mayasari, 2022).

Hal inilah yang kemudian terkadang menjadi sumber dinamika dalam bidang politik yang harus menjadi perhatian. Adapun jika dilihat dari segi identitas sosial yang terbentuk oleh berbagai faktor seperti latar belakang agama, suku, dan adat istiadat tentu tidak hanya mempengaruhi dalam aktivitas interaksi antarindividu saja, namun juga mengambil peran penting dalam membentuk sikap politik yang dapat menjadi sebuah pola yang berbeda di kalangan masyarakat (Al-Farisi, 2020)

Perbedaan-perbedaan latar belakang identitas sosial yang dimanfaatkan dalam hal politik inilah yang kemudian memunculkan fenomena politik identitas yang memiliki relevansi dengan situasi saat ini di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan hadirnya berbagai platform berbasis internet sebagai sebuah manifestasi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menumbuhkan peluang besar dan dapat terlaksana dengan jangkauan yang luas dan cepat, khususnya dalam penyebaran wacana politik berbasis identitas sosial di Indonesia (Munandar & Susanti, 2025).

Para politisi yang memanfaatkan latar belakang identitas sosial, seringkali hanya bertujuan untuk agar memperoleh suara terbanyak, bukan untuk program kerja yang baik untuk kepentingan masyarakat. Disisi lain, dampak yang diakibatkan dari adanya praktik politik identitas ini dapat berupa perpecahan yang seharusnya para politisi kembali mempersatukan masyarakat, bukan diabaikan begitu saja. Hal ini kemudian memunculkan dampak pasca masa pemilihan,

yakni masyarakat menjadi mudah tersinggung, terprovokasi, dan bahkan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

Disamping itu, politisi yang paham akan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mencapai tujuan mereka, tidak jarang mereka membuat berita bohong yang kemudian dapat memunculkan ujaran-ujaran kebencian (Mubarok, 2018). Mengingat angka literasi digital masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah, seperti misalnya, masyarakat Indonesia masih sering membaca informasi yang tidak jelas kredibilitasnya. Dari survey yang dilakukan oleh Komdigi, yang sejalan dengan road map literasi digital 2022-2024, terdapat 53% masyarakat yang menjadi sampel tidak memperhatikan substansi berita yang kredibel, dan sebagian besar masyarakat tidak berupaya melakukan pengecekan sumber informasi yang diperoleh (Pudjianto, 2022, p. 30). Meski kemudian melalui pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), angka literasi digital di Indonesia 2024 naik 0,16% dari tahun sebelumnya, yang menjadi 43,37%, angka ini masih berada dibawah 50% (Komdigi, 2024). Maka tidak dapat dipungkiri, mereka yang tidak menguasai literasi digital akan menjadi mudah terpengaruh dan mudah emosi karena tidak bisa mencerna informasi yang kemudian termakan hasutan yang dikemukakan oleh tokoh yang mereka percayai (Mubarok, 2018).

Apabila sudah terjadi situasi semacam ini, maka salah satu cara agar dapat meminimalisir dampak dari adanya politik identitas ini yaitu para penyuluh agama mau

tidak mau mereka harus menghadapi tantangan ini agar umat tidak terpecah belah. Oleh sebab itu, adanya politik identitas tentu dapat membawa dampak pada aktivitas penyebaran pesan-pesan keagamaan atau dakwah, sehingga dakwah dalam hal ini bukan menjadi alat para politisi, namun dapat menjadi sebuah solusi dari dampak dari adanya politik identitas yang dapat memicu perpecahan di kalangan masyarakat (Rohim, 2024).

Disisi lain, dampak politik identitas ini rawan dimanfaatkan oleh orang-orang radikal yang turut menumpang tujuan mereka ke dalam situasi politik yang sedang berlangsung. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang memperingatkan bahwa kelompok radikal dapat memanfaatkan politik identitas menjelang Pemilu 2024, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional (Ridho & Susanti, 2024). Demikian pula, Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan bahwa radikalisme dapat menyusup melalui gerakan politik identitas dan meracuni generasi muda melalui media social (Rizky, 2021). Sehingga hal ini tentu akan menyebabkan efek berkepanjangan yang pada akhirnya mengarah pada radikalisme, intoleransi, dan permasalahan yang menyangkut keberagaman lainnya.

Sehingga sebagai respons dalam menghadapi tantangan radikalisasi dan intoleransi yang kerap kali muncul, pemerintah terus menggaungkan paham “Moderasi Beragama” sebagai sebuah upaya dalam menghadapi tantangan dari problem

keberagaman yang ada di Indonesia (Kurniawan & Afifi, 2023).

Melalui empat pilar moderasi beragama, yang terdiri dari “Toleransi, Anti-kekerasan, Komitmen Kebangsaan, dan Akomodatif terhadap budaya lokal,” tentunya dapat diimplementasikan ke dalam penyampaian pesan dakwah agar umat tidak mudah untuk terpecah belah, terlebih ketika menghadapi tantangan politik identitas di setiap masa-masa politik (Wijayati, 2024).

Adapun penelitian terdahulu mengenai dampak politik identitas terhadap persatuan di kalangan masyarakat dapat dijumpai, seperti dalam penelitian karya Aris Munandar dan Endang Susanti yang mengangkat judul “Politik Identitas dalam Masyarakat Multikultural.” Penelitian ini membahas tentang peran politik identitas dalam masyarakat multikultural di Indonesia serta dampaknya pada kehidupan sosial dan politik, khususnya dampak yang ditimbulkan melalui pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk kampanye politik.

Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa dampak dari politik identitas, meskipun dapat memperkuat solidaritas di dalam kelompok tertentu, juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan polarisasi sosial yang merugikan kohesi sosial. Kampanye berbasis identitas yang intensif di media sosial sering kali memperburuk ketegangan antar kelompok etnis atau agama, yang berisiko merusak stabilitas politik nasional. (Munandar & Susanti, 2025).

Disisi lain, ada pula penelitian yang berjudul “Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila” karya Leli Salman Al-Farisi, yang mengkaji terkait fenomena politik identitas yang masih membutuhkan dasar teoritis untuk menjelaskan situasi secara ilmiah, mengawasi dan memperkirakan apa yang akan terjadi dan seharusnya terjadi. Berdasarkan penelitian ini, terdapat sejumlah resiko penyalahgunaan latar belakang identitas sosial masyarakat yang dapat membahayakan keberlangsungan NKRI sebagai negara Pancasila, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai hubungan agama dan politik (Al-Farisi, 2020).

Disamping itu, dampak politik identitas terhadap aktivitas dakwah juga pernah diteliti oleh Husni Mubarak yang berjudul “Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia.” Penelitian ini mengarah pada diskusi tentang berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta jalan keluarnya yang dapat dilakukan oleh *mubaligh*. Hasil dari penelitian ini mengusulkan bahwa kohesi sosial merupakan jalan keluar dalam penyelesaian masalah politik identitas di Indonesia. Mengingat bahwa kohesi sosial memiliki empat unsur, yakni keterlibatan structural, keterlibatan asosiasi, keterlibatan aktivitas sehari-hari, serta keterlibatan simbolik atau kebudayaan (Mubarak, 2018).

Selain itu, penelitian lain terkait moderasi beragama yang berkaitan dengan politik identitas, terdapat penelitian karya

Dandi Kurniawan yang berjudul “Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Solusi Menyikapi Politik Identitas” Penelitian ini mengungkapkan bagaimana perkembangan moderasi beragama dapat menjadi langkah preventif dalam menyikapi politik identitas. Sehingga moderasi beragama dapat meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh politik identitas yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara (Kurniawan & Afifi, 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka perbedaan dengan penelitian ini yang mana dalam penelitian ini menawarkan *novelty* dengan menempatkan moderasi beragama dalam aktivitas dakwah yang dapat menjadi solusi preventif dalam meminimalisir dampak negatif politik identitas. Disamping itu, dalam penelitian ini juga akan dikaji mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari politik identitas dalam aktivitas dakwah. Sehingga unsur Moderasi beragama yang menekankan nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal, serta dan komitmen kebangsaan, dapat disalurkan melalui dakwah yang inklusif, dan diharapkan mampu membangun narasi keagamaan yang dapat merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang identitas sosial tertentu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam wacana dakwah Islam di tengah dinamika sosial politik yang sarat dengan politik identitas, khususnya dalam mengkaji bagaimana fenomena politik identitas di Indonesia, klaim dakwah dalam politik

identitas di Indonesia, fenomena dakwah moderat di Indonesia serta bagaimana dakwah moderat dapat mengatasi tantangan dari adanya politik identitas yang dapat berdampak pada aktivitas dan substansi dakwah itu sendiri.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran dakwah yang mengandung nilai-nilai moderat dapat mengambil perannya dalam menghadapi fenomena politik identitas di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang mengeksplorasi fenomena-fenomena politik identitas yang pernah terjadi yang kemudian dianalisis, serta dimasukkan juga fenomena dakwah moderat sebagai upaya penyelesaian tantangan dakwah atas fenomena politik identitas di Indonesia. Dengan demikian, sumber data diperoleh melalui artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun kriteria dakwah yang inklusif yang menjadi landasan dalam menentukan dakwah yang moderat, yakni dakwah inklusif menekankan pendekatan yang terbuka, ramah, dan menghargai perbedaan pandangan dalam masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Dalam konteks ini, dakwah inklusif dalam hal politik menekankan pada pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, dialog, dan komitmen kebangsaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial

dan mencegah polarisasi di tengah masyarakat yang majemuk (Nailussa'adah, 2022).

Disamping itu, dakwah inklusif menekankan pada pemahaman dan penerimaan terhadap keberagaman serta perbedaan, yang mencakup toleransi dan pengakuan atas kebenaran dalam agama lain. Dalam konteks politik, pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keislaman. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi, serta upaya untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan (Wardah et al., 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Fenomena Politik Identitas di Indonesia

Fenomena munculnya populisme politik identitas di Indonesia merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi saat ini. Demokrasi saat ini bagaikan “pedang bermata dua”; di satu sisi, ia memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan, tetapi di sisi lain, juga membuka peluang bagi tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan etika politik. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan kehidupan demokrasi serta ketahanan nasional suatu bangsa.

Kemunculan politik identitas dalam setiap momen politik mencerminkan bahwa transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis masih belum tercapai. Demikian pula, demokrasi yang ada saat ini cenderung bersifat “eksklusif” dan “transaksional”, daripada “transformasional”.

Berbagai faktor yang mendorong politik identitas ini antara lain keberagaman Indonesia, peran media sebagai aktor politik, keberadaan konsultan bisnis dan buzzer, rendahnya literasi media sosial, tingkat pendidikan yang masih rendah, kesadaran bela negara yang minim, serta penegakan hukum yang lemah.

Salah satu alasan mengapa politik identitas terus dipergunakan dalam kontestasi pemilu adalah karena dianggap sebagai “jalan pintas” untuk meraih suara dengan cara yang “mudah dan meriah”, berkat dukungan media sosial yang mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Media sosial seringkali dijadikan sarana strategis oleh berbagai pihak berkepentingan untuk menyebarkan informasi yang tidak selalu benar atau akurat, bahkan seringkali mencampurkan antara “fakta” dan “opini” (*post-truth*) (Khotimah et al., 2024).

Praktik politisasi identitas selalu muncul di tahun-tahun politik, baik pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Seperti ketika menengok kembali ke belakang, fenomena politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia pernah menjadi sorotan utama dalam beberapa pemilu terakhir. Politik identitas merujuk pada strategi politik yang memanfaatkan atribut-atribut identitas kelompok, seperti agama, suku, atau etnis, untuk meraih dukungan pemilih. Fenomena ini terlihat jelas dalam Pemilu 2019, di mana isu-isu keagamaan digunakan untuk memobilisasi massa, seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan sentimen "jangan pilih pemimpin kafir" yang menguntungkan Anies

Baswedan melalui dukungan dari kelompok Islam tertentu (BBC, 2023).

Menjelang Pemilu 2024, meskipun terdapat upaya untuk mengurangi penggunaan politik identitas, fenomena ini tetap muncul. Misalnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, yang menggunakan tokoh agama terkemuka, mantan penasihat presiden ke-7 Republik Indonesia, dan ulama seorang ulama dari Jogja pendiri Ponpes Ora Aji, untuk meraih dukungan dari kalangan jamaah beliau. Mengingat tokoh tersebut adalah ulama yang dihormati, beliau memberikan dukungan kepada paslon 02, yang kemudian diharapkan dapat menarik suara dari pemilih yang memiliki kedekatan emosional dan afiliasi agama yang kuat dengan tokoh tersebut. Dukungan ini mencerminkan bagaimana identitas keagamaan digunakan sebagai alat untuk meraih suara dalam kontestasi politik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun politik identitas dapat efektif dalam meraih dukungan, penggunaannya dapat memperburuk polarisasi sosial dan mengancam solidaritas sosial di Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif untuk menjaga agar politik identitas tidak menjadi alat pemecah belah bangsa. Selain itu, permasalahan yang muncul dari praktik ini dapat memengaruhi ketahanan nasional, karena berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan terhadap tujuan demokrasi dan berpotensi menyebabkan perpecahan yang dapat berujung pada

instabilitas politik serta disintegrasi bangsa Indonesia (Mubarok, 2018).

Menindaklanjuti hal ini, fenomena politik identitas tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan ideologi yang menyertainya. Dalam perspektif kosmopolitanisme multikultural, politik identitas dapat dilihat sebagai bentuk resistensi terhadap homogenisasi budaya, namun pada saat yang sama berisiko menciptakan eksklusivitas baru. Oleh karena itu, strategi penanganan yang ditawarkan bukan dengan meniadakan identitas, melainkan dengan membangun ruang sosial yang cair dan inklusif, di mana identitas tidak menjadi batas utama dalam interaksi sosial dan politik. Prinsip dasar kosmopolitanisme menekankan pentingnya keterbukaan budaya dan penghargaan terhadap keberagaman, sambil tetap mengedepankan nilai-nilai universal seperti kebebasan berpikir, keadilan, dan kesetaraan. Dalam konteks ini, kebebasan individu untuk mengakses dan mengeksplorasi berbagai identitas budaya dianggap sebagai syarat penting bagi terbentuknya masyarakat yang tidak hanya toleran, tetapi juga aktif dalam merawat pluralisme secara kritis dan reflektif (I Putu Sastra Wingarta et al., 2021).

3.2. Klaim Dakwah Dalam Politik Identitas Di Indonesia

Negara-negara dengan berbagai entitas, seperti agama, etnis, dan ras, menyita perhatian di bidang-bidang tertentu dan menarik untuk melihat informasi tambahan dari berbagai perspektif. Indonesia, sebuah kepulauan yang berkisar dari Sabang sampai Merauke,

memegang banyak bahasa, budaya, dan agama sendiri. Keragaman subkultur adalah tanda bagi negara Indonesia yang perlu dipantau secara intensif karena benturan-benturan akan adanya sensitivitas atau sentiment-sentimen yang mampu menyebabkan adanya konflik kultural. Keberagaman masyarakat nampaknya niscaya bagi negara berlambangkan Garuda tersebut. Oleh karena itu, apa yang disebut politik identitas sering muncul di permukaan sejarah Indonesia modern (Rahman, n.d.). Identitas sebenarnya memiliki peran penting dalam pembentukan dan mengikat komunitas individu. Dalam kehidupan sosial, setiap individu sering memiliki beberapa identitas yang tumpang tindih, seperti identitas politik, geografis, etnis, agama, kelompok, dan hubungan. Identitas ini berinteraksi satu sama lain dan memengaruhi cara seseorang berfikir, bersikap, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang berbagai identitas adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial dan menghindari potensi konflik (Nawawi, 2019). Secara definisi Agnes Heller, menyampaikan bahwa politik identitas adalah konsep dan gerakan politik, yang fokus perbedaannya terletak pada perbedaan sebagai kategori politik utama. Dalam setiap kelompok, walaupun memiliki ideologi dan tujuan kolektif, tidak dapat dinafikan akan kedatangan berbagai individu dengan identitas yang berbeda (Lestari, 2018).

Munculnya politik identitas dalam dinamika politik Indonesia yang sangat beragam sama dengan rasa ketidakadilan yang

ditegaskan oleh semua kelompok sosial atau golongan tertentu. Selain itu, perbedaan tolak ukur terpenting dari keragaman Indonesia, menjadikan politik identitas semakin mempertegas perbedaan-perbedaan tersebut. Ketidakstabilan muncul di dalam negeri ketika konflik yang dimotivasi oleh beragam politik identitas dibiarkan. (Lestari 2018) Suatu politik identitas kadang-kadang bersifat egois dan memaksakan kehendak ketika membandingkan kepentingan politik. Oleh karena itu, dalam proses pembelaan akan mengumpulkan identitas individu yang mempunyai keselarasan dalam hal ras, agama, atau suku. Politik identitas merupakan cara bagi individu untuk memobilisasi massa dengan menggunakan identitas mereka sebagai magnet dalam menyelesaikan kepentingan anggota kelompok. Otomatisasi dari identitas dapat menarik individu yang menyerupai agama, suku, dan budaya lainnya. Perasaan etnosentrisme semakin menjadi, dimana kelompok masyarakat yang sudah terorganisir akan merasa dirinya lebih baik terhadap kelompok diluar dari pada dirinya. Situasi ini akan menggulung layaknya bola salju hingga membesar (Rahman, n.d.)

Dakwah dalam politik identitas Indonesia merupakan fenomena yang sering muncul, terutama sebelum pemilihan umum atau sebelum proses keputusan politik yang melibatkan aspek keagamaan. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, pengajaran Islam sering digunakan sebagai sarana komunikasi politik untuk menarik simpati dan dukungan publik. Faktanya, politisi, partai politik dan

kelompok kepentingan khusus, seringkali menggunakannya sebagai strategi untuk membangun identitas islam kelompok dan membangun solidaritas berbasis agama. Hal ini dapat dilihat dalam kampanye politik yang menggunakan retorika agama, khotbah yang secara terbuka mendukung kandidat tertentu, dan pedoman berdasarkan nilai-nilai islam dari sistem pemerintah.

Di satu sisi, dalam politik identitas indonesia, dakwah memiliki dampak positif, terutama dalam memberikan pemahaman publik tentang betapa pentingnya memilih pemimpin dengan nilai-nilai islam seperti integritas, keadilan dan keandalan. Dengan adanya dakwah, masyarakat dapat mengenali peran agama dalam pembentukan sistem pemerintahan yang baik berdasarkan moralitas islam. Namun, di sisi lain, jika dakwah dalam politik identitas digunakan secara berlebihan atau tidak bijak, hal ini dapat menyebabkan polarisasi dan divisi sosial. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana pernyataan agama dimanfaatkan untuk mengaburkan partai lain dengan pandangan dan keyakinan politik yang berbeda, dengan demikian menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Fenomena ini pernah terjadi dalam beberapa pemilihan di indonesia. Dimana, politik identitas berbasis agama telah menjadi alat untuk mengelola opini publik dan menimbulkan perbedaan besar antara kelompok.

Dakwah dan politik islam moderat di indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, dinamika negara dan sosial dengan mayoritas muslim terbesar di

dunia. Secara umum, dakwah islam moderat, berusaha untuk mempromosikan pesan toleransi, perdamaian, keadilan dan harmoni di antara komunitas beragama. Sejak kemerdekaan indonesia pada tahun 1945, islam telah menjadi bagian integral dari identitas negara itu. Namun, di ranah politik, berbagai interpretasi islam telah muncul, mulai dari moderat hingga yang ekstrem. Sejarah panjang dakwah islam di indonesia mencakup peran aktif dalam pendidikan nasional dan perlawanan terhadap kolonialisme.

Dakwah Islam moderat di Indonesia berupaya menjadi jembatan antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat yang majemuk. Melalui pendekatan yang inklusif dan toleran, dakwah ini menekankan pentingnya pluralisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, ketika dakwah moderat terlibat dalam politik praktis, muncul tantangan terkait persepsi publik terhadap netralitas dan tujuan dakwah tersebut. Sebagian pihak menilai bahwa keterlibatan ini dapat mengaburkan batas antara misi keagamaan dan kepentingan politik, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap motif dakwah yang dilakukan. (Rohim, 2024)

3.3. Fenomena Dakwah Moderat di Indonesia

Dakwah Islam yang moderat adalah sebuah cara dalam menyikapi pluralitas yang ada di Indonesia. Di sisi lain, dakwah moderat juga dapat mengambil perannya terlebih ketika melihat beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti pada tanggal 13-14 Mei 2025,

konflik bersenjata kembali pecah melibatkan kelompok bersenjata dan TNI di sejumlah kampung di Distrik Sugapa. Kejadian ini termasuk dalam bentuk tindakan sparatis dan kekerasan yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa. Adapula kejadian pada tanggal 4 Agustus 2024, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang pemuda berinisial HOK (19 tahun) di Kota Batu, Jawa Timur. HOK diduga merencanakan aksi bom bunuh diri di dua tempat ibadah di Kota Malang. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa HOK telah terpapar paham radikal melalui media sosial dan forum daring.

Dan masih banyak lagi kasus lain yang merupakan gerakan dari kelompok-kelompok radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sehingga, dalam hal ini dakwah Islam yang mengandung ajaran-ajaran moderasi beragama dan menjunjung tinggi toleransi dapat menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan problem ini. Selain itu, menindaklanjuti penguatan moderasi beragama, pemerintah melalui PERPRES Nomor 58 Tahun 2023 telah mengatur mengenai penguatan moderasi beragama. Hal ini juga didukung oleh peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama.

Namun, Meski telah ada beberapa regulasi tersebut, isu radikalisme dan terorisme di Indonesia masih terus berkembang. Terlebih

ditengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet, tentu penyebaran konten-konten yang tidak moderat akan semakin mudah. Seperti yang diungkapkan BNPT, bahwasannya terdapat 180 ribu konten yang mengandung terorisme telah di blokir. Langkah strategis ini merupakan langkah preventif BNPT dalam mencegah penyebaran paham terorisme (BNPT, 2024). Keterlibatan pemerintah dalam menghadapi tantangan isu radikalisme ini tentu akan menjadi sia-sia jika tidak di dukung oleh para penyuluh agama agar terus ikut serta melawan konten-konten radikalisme dengan menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama melalui dakwahnya (Mubarak, 2018).

Adapun point penting yang menjadi indikator moderasi beragama berdasarkan PERPRES Nomor 58 Tahun 2023, terdiri dari 4 indikator:

- a. Komitmen Kebangsaan, yang berarti menunjukkan kesetiaan terhadap negara, cinta tanah air, dan tidak menyebarkan konten yang memecah belah persatuan bangsa.
- b. Toleransi, artinya menerima perbedaan dan menghormati keyakinan orang lain.
- c. Anti Kekerasan, berarti menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama.
- d. Penerimaan terhadap Tradisi, yang artinya seseorang harus bersikap ramah terhadap tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan.

Melalui empat point indikator ini, tentu harapan pemerintah adalah agar para Da'i dapat ikut serta menyebarkan pesan-pesan yang mengandung moderasi beragama. Adapun konsep dakwah Islam moderat merupakan upaya menyebarkan ajaran Islam yang mengedepankan aspek toleransi dan kedamaian. Konsep dakwah semacam ini sangat penting diterapkan di Indonesia dengan keberagamannya. Sehingga dalam hal ini dakwah memainkan peran krusial guna memperkokoh kerukunan antarumat beragama dan dapat membantu menjaga stabilitas sosial (Rahmawati, 2021).

Disamping itu, guna mempermudah dalam berdakwah, Da'i juga dapat memanfaatkan teknologi seperti media sosial yang dapat menjangkau banyak audiens. Seperti yang dilakukan oleh beberapa Da'i saat ini, yang salah satunya adalah Habib Ja'far. Konten-konten dakwah Habib Ja'far selalu dikemas dengan narasi yang menjunjung tinggi toleransi. Disamping itu, isi konten yang mudah dicerna dan menjadikan pemuda sebagai segmentasi dakwahnya menjadikan dakwah Habib Ja'far digandrungi oleh banyak pengguna media sosial.

Integrasi dakwah menggunakan teknologi digital seperti yang diterapkan Habib Ja'far ini tidak hanya memperluas jangkauan audiens, namun juga memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pendakwah dan audiens. Akan tetapi, adaptasi dakwah moderat di era saat ini menghadapi banyak tantangan, khususnya terkait akurasi pesan dan kredibilitas para pendakwah di media sosial.

Oleh sebab itu, pelaksanaan aktivitas dakwah yang memanfaatkan teknologi digital harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pola interaksi, efisiensi penyebaran pesan, serta penyesuaian konten guna menjaga nilai-nilai ajaran Islam yang tetap dalam koridor moderasi beragama.

Selain Habib Ja'far, sejumlah dai di Indonesia tampil dengan pendekatan dakwah yang mengusung nilai-nilai moderasi beragama. Gus Muwafiq, misalnya, secara konsisten menyampaikan ceramah yang menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal dan kerukunan antarumat. Dalam ceramahnya di berbagai pesantren maupun forum kebangsaan, Gus Muwafiq menolak sikap eksklusif yang memusuhi tradisi. Ia menekankan bahwa keberagaman budaya di Nusantara adalah kekayaan yang sejalan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil 'alamin. Ceramah beliau di video "*Toleransi Keberagaman di Kampus Kebangsaan*" (YouTube) memperlihatkan bagaimana Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks kebudayaan dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain.

Sementara itu, Ustadz Hanan Attaki membawa pesan Islam yang sejuk kepada generasi muda melalui gaya komunikasi yang ringan dan membumi. Meski tidak secara eksplisit menyebut istilah "moderasi beragama", isi dakwahnya mencerminkan prinsip tersebut. Ia mengajak anak muda untuk bersikap terbuka, tidak mudah menghakimi, serta mengedepankan akhlak dan cinta kasih. Dalam ceramahnya berjudul "*Berprasangka*

Baiklah dengan Allah”, Hanan menekankan pentingnya husnudzon sebagai pondasi hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Sikap ini menjadi pintu masuk yang efektif dalam membentuk generasi muslim yang inklusif dan jauh dari ekstremisme atau sikap keberagamaan yang kaku.

Ustadz Adi Hidayat juga turut berkontribusi dalam menyuarakan nilai-nilai moderasi beragama dengan pendekatan berbasis tafsir Al-Qur’an. Dalam berbagai ceramahnya, ia kerap membahas tentang pentingnya keseimbangan (*tawazun*), sikap adil, dan toleransi dalam kehidupan beragama. Dalam video ceramah berjudul *“Toleransi Antar Umat Beragama”*, Ustadz Adi menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan kepada yang berbeda keyakinan, melainkan menganjurkan dialog, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Dakwahnya menjadi contoh bagaimana ulama dapat meredam narasi eksklusivisme dan membawa ajaran Islam pada wajah yang lebih damai, proporsional, dan kontekstual.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan dakwah moderat melalui pemanfaatan teknologi di era saat ini, penting bagi para Dai dan pengguna media sosial sebagai Mad’u agar meningkatkan kemampuan literasi digital. Khususnya para Dai harus memahami bahwa karakteristik audiens dari setiap platform akan berbeda-beda. Sehingga pesan yang disampaikan pun harus sesuai dengan karakteristik tersebut dan sesuai dengan perkembangan serta tantangan zaman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa

fenomena dakwah yang terjadi dapat mengambil peran secara optimal untuk membentuk pemahaman Islam yang damai dan Inklusif di era saat ini.

3.4. Dakwah Moderat dalam Menghadapi Tantangan Politik Identitas di Indonesia

Fenomena politik identitas di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika kontestasi politik yang sering mengeksploitasi perbedaan agama, suku, dan budaya sebagai alat mobilisasi massa. Praktik ini memicu polarisasi sosial yang tajam, sebagaimana terlihat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, di mana narasi keagamaan digunakan untuk mendeligitimasi lawan politik dan membangun loyalitas sektarian. Dalam menghadapi fenomena ini, dakwah Islam memiliki tanggung jawab untuk tidak terjebak dalam pusaran politik praktis, tetapi mengambil posisi sebagai penyeimbang yang menegaskan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan.

Dakwah moderat kemudian hadir sebagai strategi penting dalam merespons ancaman politik identitas. Pendekatan dakwah yang menekankan pada inklusivitas, toleransi, dan penerimaan terhadap keberagaman menjadi kontra narasi yang sangat dibutuhkan untuk meredam potensi perpecahan sosial. Moderasi beragama tidak hanya menjadi wacana teologis, melainkan juga praksis sosial yang menolak kekerasan, menghargai perbedaan, dan mendukung komitmen kebangsaan. Hal ini ditegaskan dalam program-program Kementerian Agama dan

BNPT yang menjadikan moderasi beragama sebagai benteng utama dalam menghadapi radikalisme dan politisasi agama.

Selain itu, dakwah moderat kini berkembang melalui pemanfaatan media digital yang menjangkau audiens luas, terutama generasi muda. Para dai seperti Habib Ja'far menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang ramah, inklusif, dan penuh humor, namun tetap substansial. Adapun contoh dakwah moderat menjelang masa-masa pemilu tahun 2024 yang lalu adalah ceramah dari K.H. Ahmad Muwafiq ketika sedang mengisi pengajian di momen hari jadi ke-117 Kota Blitar, yang mana juga di upload ke dalam channel Youtube milik Gus Muwafiq (Gus muwafiq Channel) dengan judul "Pemenang Pilpres Tetap Sama". Meskipun menggunakan judul tersebut, Gus Muwafiq dalam ceramahnya tidak ada unsur mendukung salah satu paslon tertentu, atau mengarahkan jamaahnya untuk mendukung paslon tertentu, namun justru pembahasannya mengenai bagaimana Islam di Indonesia dapat menyatu dengan adat, membangun keharmonisan dan toleransi, serta membahas terkait adopsi model Islam luar negeri yang tidak cocok dengan konteks masyarakat Indonesia.

Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia bias menjadi contoh sukses dalam upaya menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Ini menjadi langkah strategis dan sesuai dengan unsur moderasi beragama, yakni akomodatif

terhadap budaya lokal. Disamping itu, ceramah semacam ini juga dapat digunakan dalam melawan narasi-narasi eksklusif dan praktik politik identitas yang tersebar di media sosial (Muwafiq, 2024).

Adapun contoh konten yang sempat viral di masa-masa pemilu 2024 yang lalu adalah tentang statement Abah Aos yang menyebutkan paslon wapres 01 adalah Imam Mahdi. Ini menjadi isu kontroversial pada masanya. Selain itu, muncul juga perdebatan mengenai apakah ini adalah statement pribadi atau termasuk dalam strategi paslon 01 dalam meraih suara (Nabila, 2023).

Melihat dua model dakwah ini, peran dakwah moderat dalam menghadapi politik identitas tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan transformatif. Dakwah tidak lagi sebatas ceramah konvensional, tetapi menjadi gerakan sosial yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya secara universal. Untuk itu, sinergi antara tokoh agama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat penting dalam membangun ekosistem dakwah moderat yang berkelanjutan di tengah ancaman disintegrasi akibat eksploitasi identitas

4. Simpulan dan Saran

Fenomena politik identitas di Indonesia terus muncul dalam setiap kontestasi politik, seperti Pemilu dan Pilkada. Politik identitas digunakan sebagai strategi efektif untuk menarik dukungan berbasis agama, etnis, atau budaya, namun berisiko menimbulkan polarisasi sosial dan melemahkan solidaritas nasional. Media sosial menjadi alat utama

dalam menyebarkan kampanye berbasis identitas, terutama karena literasi digital masyarakat yang masih rendah.

Di sisi lain, praktik dakwah dalam politik identitas memperlihatkan bahwa agama sering dimanfaatkan sebagai alat politik. Meskipun dakwah dapat memberikan kesadaran politik berbasis nilai-nilai Islam, penggunaannya secara eksklusif dapat memperkuat perpecahan sosial dan mencederai prinsip netralitas dakwah.

Sementara itu, dakwah Islam moderat hadir sebagai solusi untuk meredam ekstremisme dan intoleransi, serta menjaga persatuan bangsa. Pendekatan moderat yang mengedepankan toleransi, kebangsaan, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap tradisi lokal menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat majemuk. Da'i modern seperti Habib Ja'far, Gus Muwafiq, Hanan Attaki, dan Adi Hidayat telah menunjukkan bahwa dakwah yang sejuk dan inklusif lebih diterima masyarakat, terutama generasi muda.

Melihat kompleksitas hubungan antara dakwah, politik identitas, dan dinamika masyarakat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas dakwah Islam moderat di media sosial dalam meredam narasi kebencian dan ekstremisme di kalangan generasi muda. Selain itu, penting juga untuk meneliti dampak politik identitas terhadap kohesi sosial pasca pemilu serta bagaimana peran pendidikan dan literasi digital dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap politisasi identitas.

Daftar Pustaka

- Al- Farisi, L. S. (2020). POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 10(2), 77–90.
- BBC. (2023). *Mengapa Partai Ummat gaungkan "politik identitas" - dan kenapa pilihan itu dianggap "berbahaya"?* BBC.Com. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14n_xqz57jqo?utm_source=
- BNPT. (2024). *BNPT: 180 Ribu Konten Bermuatan Terorisme Diblokir Sepanjang 2024*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Day, S. B. (2005). Hubungan Politik dan Dakwah. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i1.1171>
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Khotimah, K., Ekasari, S. R., Kholifah, E. N., Triyanti, N. A., Ismail, I., & Hidayatullah, A. F. (2024). PENTINGNYA LITERASI MEDIA ERA DISRUPSI DIGITAL DAN POST TRUTH. *Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 15(2), 191–198.
- Komdigi. (2024). *Peluncuran Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024: "Membangun Masyarakat Digital Berbasis Kewilayahan."* Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik.
- Kurniawan, D., & Afifi, A. A. (2023). Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Solusi Menyikapi Politik Identitas. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4, 13–21. <https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.30>

- Lestari, Y. S. (2018). *Politik Identitas Di Indonesia : Antara Nasionalisme Dan Agama*. *I(1)*, 19–30.
- Mubarok, H. (2018). Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, *2(2)*, 365–400.
- Munandar, A., & Susanti, E. (2025). Politik Identitas Dalam Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Politik Sosial di Indonesia). *JIPSH*, *1(1)*, 1–14.
- Muwafiq, G. (2024). *Pemenang Pilpres Tetap Sama*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wxYKnes0X6Y>
- Nabila, F. (2023). *Siapa Imam Mahdi, Pemimpin Akhir Zaman yang Disebut Abah Aos Mirip Anies Baswedan*. Suara.Com. <https://www.suara.com/lifestyle/2023/12/28/091857/siapa-imam-mahdi-pemimpin-akhir-zaman-yang-disebut-abah-aos-mirip-anies-baswedan/>
- Nailussa'adah, N. (2022). DAKWAH INKLUSIF: ALTERNATIF PENGUATAN MODERASI BERAGAMA. *Nusantara Hasana Journal*, *2(6)*, 83–89.
- Nawawi, A. M. (2019). Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik Identitas dalam Masyarakat Meme Da'wah of Moderate Islam and the Reality of Political Identity in Society of Memes. *Jurnal Bimas Islam*, *12(1)*, 70–92.
- Nirwana, A. (2016). AKULTURASI POLITIK DALAM DUNIA DAKWAH. *Substantia*, *18(2)*, 207–218.
- Nurlaela, E. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Dakwah Moderat. *Dirasa Islamiya*, *2(1)*, 51–69. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.41>
- Pudjianto, B. W. (2022). *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*.
- Rahman, M. T. (n.d.). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*.
- Rahmawati, F. (2021). Konsep Dakwah Moderat: Tinjauan Ummatan Wasathan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:143. *Studia Quranika*, *6(1)*. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v6i1.5570>
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2022). Politik Identitas Dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik Di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, *8(1)*, 91–105. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5608>
- Ridho, R., & Susanti, R. (2024). *Wapres Minta Waspadai Munculnya Kelompok Radikalisme Jelang Pilpres 2024*. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2022/10/28/173550278/wapres-minta-waspadai-munculnya-kelompok-radikalisme-jelang-pilpres-2024?utm_source=
- Rizky, F. (2021). *Moeldoko: Radikalisme Menyusup di Gerakan Politik Identitas*. INews.Id. https://www.inews.id/news/nasional/moeldoko-radikalisme-menyusup-di-gerakan-politik-identitas?utm_source=
- Rohim, A. (2024). Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik di Indonesia. *Ad-DA'WAH*, *22(1)*, 17–33. <https://doi.org/10.59109/addawah.v22i1.60>
- Wardah, S. N., Hawa, R. N., Zahra, S. A., Nabilah, S., & Anwar, S. (2024). Dakwah Inklusif sebagai Sarana Generasi Z untuk Mewujudkan Moderasi Beragama. *Idarotuna*, *6(1)*, 1–15. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v6i1.27072>
- Wijayati, E. (2024). Penerapan Moderasi Beragama di Indonesia : *El-Faqih*, *10(2)*, 301–315.